

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keperilakuan Organisasi Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Maria Magdalena Sisilia Mandawa

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Indonesia
Korespodensi: mmsmandawa@gmail.com

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor keperilakuan (pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan) terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke Sampel yang diambil adalah bidang akuntansi, bidang aset dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan tujuan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, (3) terdapat pengaruh positif dukungan atasan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah (4) Pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dukungan atasan terhadap Penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kata Kunci: Faktor Keperilakuan Organisasi, Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan, Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Abstract. The objectives in this study are to analyze the influence of behavioral factors (training (training, clarity of purpose, and superior support) on the use of regional financial accounting systems. The population of this study were all employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Merauke Regency. employees of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Merauke Regency. accounting, asset and budget fields of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Merauke Regency. (BPKAD) Merauke Regency Method The data analysis method used is descriptive analysis. Research results show (1) there is a positive and significant effect of training on the use of regional financial accounting systems, (2) there is a positive and significant effect of training on the use of regional financial accounting systems, (2) there is a positive and significant effect on the use of regional financial accounting systems. significant effect of goal clarity on the use of regional financial accounting systems (3) there is a positive influence of superior support on the use of regional financial accounting systems (4). regional financial accounting system (4) The effect of training, clarity of goals of supervisor support on the use of regional financial accounting systems regional financial accounting system.

Keywords: Organizational Behavioral Factors, Training, Clarity of Purpose, Supervisor Support, Use of Regional Financial Accounting Systems. Objectives, Superior Support, Use of Regional Financial Accounting Systems.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintah, serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah, pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Sejalan dengan

pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelolah sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efesien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah diatur pada peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.59/PMK.06/2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Permendragi No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah perubahan atas permendragi No.13 tahun 2006 yaitu pada Pasal 232 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah, oleh karena itu penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemerintah sebagai pengelolaan dana publik wajib mencapai atau menyiapkan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Whayundaru, 2001). Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Undang – undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelolah sumberdaya yang dimilikinya, akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdayanya tersebut oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntunan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Menurut Permendragi No.13 Tahun 2006 yang kini telah di perbarui oleh Permendragi No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisan sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu, maka hak ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah akan menyebabkan pengendalian interen lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: Validity, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. Reliability, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efesien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal (Carolin,2009).

Organisasi pada pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang - kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi pengeluaran asset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendragi No. 13/2006 yang kemudian direvisi kembali pada pemendragi No.21/2011 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati - hati untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya di tentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (*Bodnar dan Hopwood, 1995*) agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut.

Berdasarkan Latifah (2007), ada kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SKAD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sector publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelolah dana secara transparan, ekonomis,efektif,dan akuntabel.

Menurut Tampubolon (2004) perilaku keorganisasian adalah studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi, yang mana dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam organisasi. Perilaku organisasi ini mendasarkan pada analisis terhadap manusia yang ditunjukan bagi kemanfaatan orang. Menurut Thoha (2002) perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Selain faktor teknis, beberapa penelitian menunjukan bukti empiris bahwa faktor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, bepengaruh positif terhadap implementasi, suatu inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen (Krumweide,1998 dalam Latifa dan Sabeni 2007).

Shield (1995) dalam Latifa dan Sabeni (2007) berpendapat dalam pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasikan hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi pengguna untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan kawatir dalam proses implementasi.

Alasan kenapa pemerintah memerlukan pelatihan atas sistem akuntansi karena penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, menurut Mardiasmo (2004), SKAD dapat mengasilakan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat di percaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian interen lemah dan

akhirnya laporan keuangan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Menurut Robbins (2003) organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi dari organisasi terkait. Apabila kejelasan tujuan organisasi yang berupa pelaksanaan SAKD tidak dijalankan secara tepat dan didukung secara aktif oleh atasan, maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan berguna karena kejelasan tujuan memperlihatkan transparansi didalam sebuah organisasi yang memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan alur yang harus dilalui atau dicapai seluruh anggota organisasi dalam bekerja. Kejelasan tujuan memperlihatkan keseriusan organisasi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor perilaku selanjutnya dalam meningkatkan kegunaan dari penerapan SAKD adalah adanya dukungan atasan dalam organisasi. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumberdaya. Atasan dapat fokus pada sumberdaya yang diperlukan, tujuan, dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

Perbedaan dari penelitian adalah pada jumlah variabel dan cakupan wilayah. Penelitian fokus pada tiga variabel yang mencakup Dukungan Atasan, Kejelasan, Tujuan Dan Pelatihan serta tidak melibatkan konflik kognitif dan efektif yang telah disebutkan oleh peneliti. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti kembali tentang faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kegunaan sistem keuangan daerah. Di mana tempat yang dijadikan objek adalah Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke yang mempunyai masalah karyawan sebagian banyak tidak mengerti atau paham mengenai penggunaan dari sistem akuntansi keuangan daerah, karena belum banyak yang melakukan penelitian mengenai faktor keperilakuan organisasi terhadap penggunaan akuntansi keuangan daerah, oleh karena itu peneliti melakukan sebuah replikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Nurlaila dan Rahmawati (2010). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, secara umum penelitian ini lebih sederhana dari penelitian sebelumnya yaitu model yang digunakan hanya melihat pengaruh langsung antara variabel independen dan variabel dependen.

2. Metode

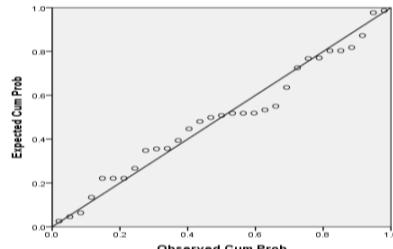
Penelitian dilaksanakan pada badan pengelolah keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke selama 1 bulan. Jenis dari sumber data yang dipakai didalam penelitian ini ialah data primer, data primer ialah data yang didapat peneliti secara langsung sama dengan cara dilakukan penyebaran angket kuisioner yang pengisian berbagai pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan akan diserahkan kepada responden, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Penelitian ini yang menjadi variabel *independen* (X)

adalah pelatihan, kejelasan dan tujuan dan dukungan atasan sedangkan variabel *dependen* (Y) adalah Penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan dat yang diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik dengan bantuan program SPSS. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai yang mempunyai kewenangan bagian keuangan pada kantor badan pengelolah keuangan dan aset daerah (BPKAD) kabupaten Merauke dengan jumlah sampel 31.

variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor keperilakuan yang terdiri dari: Pelatihan (X1) , Kejelasan Tujuan (X2), Dukungan Atasan (X3). Variabel Sistem akuntansi keuangan daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara stranparan, ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Pengkuran kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Chenhall (2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengujian yang pertama adalah uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan sebaran P-Plot. Berikut hasil perhitungan SPSS:



Gambar 1. Normalitas P-Plot

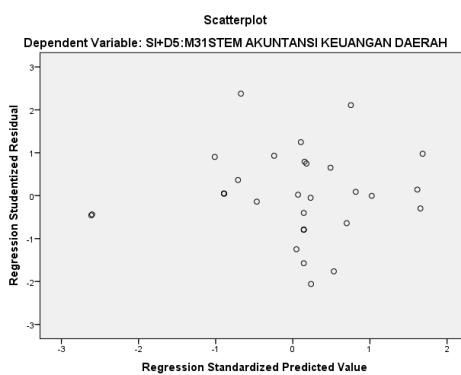
Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik normal plot dapat di simpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola grafik yang normal. Grafik diagonal grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variable bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila *tolerance* $\geq 0,10$ (10%) dan $VIF \leq 10$.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PELATIHAN	.433	2.311
KEJELASAN TUJUAN	.312	3.200
DUKUNGAN ATASAN	.621	1.612

Berdasarkan tabel yang diatas bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dari nilai VIF kurang dari 10. Jika dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas pada model regresi. Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yakni pelatihan $0,433 > 0,10$, kejelasan tujuan $0,312 > 0,10$ dukungan atasan $0,621 > 0,10$ hasil perhitungan *variance infalatin factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni pelatihan $2,311 < 10$, kejelasan tujuan $3,200 < 10$. Dan dukungan atasan $1,612 < 10$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel *independen*.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 17



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan masukan variabel independen pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan.

Secara parsial model regresi pertama dapat diuji kebermaknaannya menggunakan uji t, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Signifikansi Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	17.872	6.519		2.741	.011
PELATIHAN	.016	.178	.024	.490	.029
KEJELASAN TUJUAN	.472	.359	.414	.316	.009
DUKUNGAN ATASAN	.038	.171	-.050	.324	.025

Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel Pelatihan (X1) diperoleh nilai t hitung 0,490 dengan sig. = 0,029 < 0,05, sehingga ada pengaruh Pelatihan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Merauke diterima, dan memberikan pengaruh positif. Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel Kejelasan Tujuan (X2) diperoleh nilai t hitung = 0,316 dengan sig. = 0,009 < 0,05, sehingga ada pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah diterima, dan memberikan pengaruh positif. Sedangkan hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel Dukungan atasan diperoleh t hitung = 0,324 dengan sig. = 0,025 < 0,05 sehingga ada pengaruh Dukungan Atasan terhadap penggunaan Sistem akuntansi keuangan daerah diterima, dan memberikan pengaruh positif.

Koefisien determinasi parsial dapat dihitung berdasarkan nilai *Correlations Partial* dalam tabel *Coefficients* berikut:

Tabel 3. Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.406 ^a	.164	.374	2.642

Dari tabel diatas hasil perhitungan untuk R^2 diperoleh angka koefesien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,374 hal ini berarti bahwa 37,4% variabel penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, dipengaruhi oleh variabel pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan, sedangkan 62,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penjelasan ini.

3.1. Pengaruh Pelatihan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pelatihan terhadap penggunaan SAKD yang menyatakan bahwa ada Pelatihan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah diterima. Dari hasil analisis deskriptif secara keseluruhan pelatihan dalam kategori sesuai dengan kondisi penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah dalam kategori. Shield (1995) berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi serta menyediakan suatu sarana bagi penggunaan untuk dapat mengerti, menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau perasaan khawatir dalam proses implementasi. Hasil analisis deskriptif variabel pelatihan berpengaruh terhadap SAKD Berdasarkan penjabaran di atas, sejalan dengan pendapat ahli, Wildoms Sahusilawane (2016) dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan yang ada memberikan kontribusi dalam membentuk penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

3.2 Pengaruh Kejelasan Tujuan Terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji signifikan parameter individual (uji t) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0,05 yang berarti ada pengaruh kejelasan tujuan terhadap

penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah diterima. Dari hasil analisis deskriptif secara keseluruhan kejelasan tujuan dalam kategori sesuai, sesuai dengan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Kejelasan tujuan dalam organisasi pemerintah dapat terlihat dari visi dan misi organisasi terkait. Penggunaan merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Apabila kejelasan tujuan yang berupa pelaksanaan tidak dijalankan secara tepat maka penggunaan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan terwujud. Disamping itu, kejelasan tujuan juga merupakan suatu teknik yang ampuh untuk memotivasi pegawai apabila kejelasan tujuan dapat digunakan secara tepat, dimonitor secara hati-hati dan didukung secara aktif oleh atasan, maka kejelasan tujuan dapat meningkatkan hasil dan tujuan yang diinginkan.

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki. Chenhall (2004) dalam Nurlaela dan Rahmawati (2010) menjelaskan bahwa kejelasan tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disemua level organisasi. Sedangkan menurut Latifah dan Sabeni (2007) menjelaskan bahwa kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Shield (1995) dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Dalam Kejelasan Tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Hasil analisis deskriptif variabel kejelasan tujuan menunjukkan terdapat 9% kejelasan tujuan yang sesuai. Sebagian besar yang mempunya kejelasan tujuan yang sesuai diharapkan dapat menentukan keberhasilan sistem sehingga dapat mencapai target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penjabaran di atas, sejalan dengan pendapat ahli, penelitian terdahulu, Cyintia Carolina (2013) dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan tujuan yang ada memberikan kontribusi dalam membentuk penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

3.3 Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji signifikan parameter individual (uji t) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi dukungan atasan terhadap penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah $< 0,05$, berarti ada pengaruh dukungan atasan terhadap

penggunaan SAKD diterima. Dari hasil analisis deskriptif secara keseluruhan dukungan atasan dalam kategori sesuai, sesuai dengan Penggunaan SAKD yang juga dalam kategori Netral. Dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Atasan dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam implementasi.

Dukungan atasan sangat penting dalam meningkatkan penggunaan dari penerapan suatu sistem, terutama dalam situasi inovasi dikarenakan adanya kekuasaan atasan terkait sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam penerapan sistem baru. Dukungan atasan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan penggunaan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, jika di suatu instansi pemerintahan tidak adanya dukungan atasan maka sistem yang akan dikembangkan tidak akan sesuai dengan rencana instansi dan dengan demikian tujuan instansi pemerintahan tidak akan tercapai. Chenhall (2004) dalam Nurlaela dan Rahmawati (2010) mengungkapkan bahwa dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. positif dukungan atasan terhadap Penggunaan SAKD.

4. Kesimpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan Ada pengaruh pelatihan terhadap penggunaan SAKD. Artinya, semakin baik pelatihan mengenai penggunaan sistem akuntansi keuangan yang diberikan maka akan memberikan peningkatan dalam penggunaan SAKD. Variable kedua terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap penggunaan SAKD. Artinya, semakin baik kejelasan tujuan yang diberikan maka akan memberikan peningkatan dalam penggunaan SAKD. Yang ketiga ada pengaruh dukungan atasan terhadap penggunaan SAKD. Artinya, semakin baik dukungan atasan yang diberikan maka akan memberikan peningkatan dalam penggunaan SAKD.

5. Daftar Pustaka

- Chenhall, R.H. (2004). *The Role of Cognitif and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Based Cost Management*. Behavioral Reaserch in Accounting 16:19
- Arifin, M., Romdioni, A., & Kastanya, M. (2023). Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Perusahaan Saat Terjadi Covid-19. *Musamus Accounting Journal*, 5(2), 86-96.
<https://doi.org/10.35724/maj.v5i2.5352>
- Dewi dan Dwiranda. 2013. Dukungan Manajemen Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual Dan Kepuasan Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.1 : 196-214

- Engko, Cecilia. (2013). Analisis Faktor Organisasional Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* Vol. 11, No. 1
- Fatimah. 2013. Pengaruh Pelatihan, Dukungan Managemen Puncak dan Kejelasan Tujuan terhadap Efektifitas Sistem Informasi Keuangan Daerah. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Ghozali,
- Gusmani, G. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Musamus Accounting Journal*, 5(1), 17-25. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i1.5308>
- Hayon, P., & Wati, C. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Sektor Publik Pada Koperasi Karyawan Nusantara Bersatu. *Musamus Accounting Journal*, 5(2), 53-63. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i2.5311>
- Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. BadanPenerbit Universitas Diponegoro. Semarang Ikhlas, Arfan dan Ishak Muhammad. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat. Jakarta
- Kaok, M., & Akbar, N. (2023). Pengaruh Net Profit Margin, Return On Asset, Dan Return On Equity Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Musamus Accounting Journal*, 5(2), 70-85. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i2.5315>
- Keban, L., & Ilham, M. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Musamus Accounting Journal*, 5(2), 64-69. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i2.5312>
- Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni. (2007). Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Symposium Nasional Akuntansi 10*. Makasar
- Luthans, F. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta
- Menurtu Pangabean (2004) Nurkhamid, Muh. (2008). Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 3, No. 1
- Nurlaela, Siti dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. *Jurnal SNA XIII*
- Rohman, Abdul. 2009. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah)". *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tjhai Fung Jin. 2003. "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*
- Parapaga, F. (2023). Analisis Utilitarian Value Dan Hedonic Value Terhadap Behavior Intention Konsumen Online. *Musamus Accounting Journal*, 5(2), 97-105. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i2.5342>

- Puspitasari, A. (2022). Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Merauke. *Musamus Accounting Journal*, 5(1), 26-35. <https://doi.org/10.35724/maj.v5i1.5309>
- Robbins, P. Stephen. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta : PT Indeks
- Shields, M. D., and S. M. Young. (1995). *Behavioral Model for Implementing Cost Management Sistem, Journal of Cost Management* (Winter), 17:25
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta :
- Andi Sri Dewi Wahyundaru (2001), *Akuntansi Sektor Publik dalam Otonomi Daerah*. Suara Merdeka. Edisi 21 Februari
- Tampubolon, Manahan P. (2004). Perilaku Keorganisasian Edisi 1. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Yuliana, Risna. 2012. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta